

Pengarusutamaan Isu Lingkungan Terhambat Lobi

Jakarta, Kompas - Perspektif lingkungan yang hingga kini belum menjadi arus utama pembangunan nasional, di antaranya, disebabkan lobi-lobi yang lemah. Kementerian Negara Lingkungan Hidup menjadi bagian di dalamnya.

"Lingkungan itu isu politik. Oleh karena itu, lobi-lobi harus dikuatkan. Itu yang kurang dari kementerian lingkungan hidup," kata anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, Tjatur Sapto Edy, yang pada periode lalu menjadi anggota Komisi VII membidangi lingkungan, pada diskusi evaluasi lima tahun dan proyeksi lingkungan hidup di Jakarta, Selasa (13/10).

Lemahnya lobi tersebut, dinilai Tjatur, berbanding terbalik dengan posisi Indonesia yang di kancah internasional sangat dihormati, khususnya dalam negosiasi perubahan iklim. "Di dalam negeri peran sektor lain jauh lebih dominan."

Menurut dia, lobi lemah, di antaranya, ditunjukkan oleh minimnya anggaran kementerian, yaitu kurang dari Rp 500 miliar per tahun. Bandingkan dengan anggaran pengelolaan sampah Bantar Gebang DKI Jakarta yang Rp 350 miliar serta anggaran pendidikan dan latihan Departemen Perhubungan yang lebih dari Rp 600 miliar.

Lemahnya lobi juga ditunjukkan ketiadaan prioritas pembangunan di sektor lingkungan. Baru setelah ada campur tangan Komisi VII, isu lingkungan menjadi prioritas pada tahun 2008.

Lobi, lanjut Tjatur, tidak hanya ditujukan kepada DPR, tetapi juga departemen lain, presiden, dan partai-partai politik. "Bayangkan Rp 500 miliar untuk menangani lingkungan dari Sabang sampai

Merauke," katanya.

Meskipun persoalan lingkungan bukan hanya soal minimnya anggaran, jumlah anggaran itu dinilai lemah. "Posisi tawar KNLH di tingkat nasional memang perlu diperkuat," kata Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia Setyo S Moersidik.

Menurut dia, lobi kementerian pada era baru diperlukan untuk memengaruhi keputusan departemen atau sektor lain. Langkah lain adalah membuat kebijakan mendasar untuk mengubah persepsi pembangunan yang selama ini masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Kewenangan kuat

Menjelang masa jabatan menteri berganti, DPR mengesahkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberi kewenangan kuat. Salah satu harapan, ada pencemar lingkungan besar yang dipidanakan.

"Setahun ke depan kami harap ada satu atau dua penjahat lingkungan besar yang diperkarakan. Jangan yang kecil-kecil saja," kata Tjatur.

Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Siti Maemunah, kewenangan kuat KNLH percuma tanpa keberanian mempraktikkannya. "Indonesia butuh kebijakan yang berani," ujarnya.

la mencontohkan kehancuran lingkungan di Kalimantan Timur, yang terus terjadi hampir tanpa upaya serius menghentikannya, termasuk upaya pemedanaan. Jika sebelumnya pembabatan hutan yang merusak Kaltim, kini eksploitasi batu bara.

Meski lebih dari 100 juta ton batu bara dihasilkan setiap tahun di Kalimantan Timur, penduduk Kalimantan Timur tak diterangi listrik sepanjang hari. Justru bencana ekologis terus bertambah frekuensi dan dampaknya. "Bukannya mengurangi produksi demi lingkungan, pemerintah justru menyetujui peningkatan produksi batu bara. Seolah-olah tak ada hubungan antara bencana dengan eksploitasi sumber daya alam," kata Siti. (GSA)